

Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia

Rini Sulistiawati[☆]

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of investment on economic growth, labor absorption and social welfare at province in Indonesia. The study period was five years i.e. from 2006 to 2010 by using secondary data provided by Central Bureau of Statistics in the form of combination between times series data (from 2006 to 2010) and cross-sectional data (33 province in Indonesia) also known as panel data. Hypothesis testing in this study is conducted by using Path Analysis Model under SPSS 17.0. Test of 5 (five) hypothesis with level of significance $\alpha = 0.05$ obtained the following results: First, investment has a negative but not significance effect on economic growth. Second, investment has a positive and significance effect on labor absorption. Third, economic growth has a positive but not significance effect on labor absorption. Fourth, economic growth has a positive but not significance effect on social welfare. Fifth, labor absorption has positive but not significance effect on social welfare.

Keywords: *Investment, Economic Growth, Labor Absorption and Social Welfare*

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (RPJM 2010-20140). Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Selanjutnya peningkatan stok modal akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Perkembangan realisasi investasi PMTB provinsi selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 yang tercantum pada Tabel 1 menunjukkan pulau Jawa dan Sumatera masih menjadi pilihan utama lokasi investasi. Realisasi investasi PMTB di pulau Jawa mencapai sekitar 62 persen dari total seluruh investasi di Indonesia, sedangkan di Sumatera mencapai sekitar 20 persen. Persebaran investasi yang tidak

[☆] Dosen Tetap Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Jalan A Yani, Pontianak, Indonesia. Alamat Email: rini_s5300@yahoo.co.id

merata ini tentunya akan berdampak pada kesenjangan pembangunan dan penyediaan lapangan kerja provinsi di Indonesia.

Secara teoritis, tingkat pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan investasi seperti yang dinyatakan antara lain oleh Keynes dalam Jhingan (2003:133-134) dan Mankiw (2006:93), Harrod Domar dalam Arsyad (2010:82-86), Solow-Swan dalam Arsyad (2010 :88-89), Kuznet dalam Arsyad (2010:277), Todaro (2000:136), dan Schumpeter dalam Sukirno (2008:122). Keynes menyarankan agar pemerintah meningkatkan pengeluaran karena memandang pemerintah sebagai agen independen yang mampu menstimulasi perekonomian melalui kerja publik. Pada masa resesi, kenaikan pengeluaran pemerintah (G) akan mendorong konsumsi (C) dan investasi (I), dan karenanya menaikkan pendapatan nasional (Y).

Tabel 1. Realisasi Investasi Pmtb Menurut Wilayah Di Indonesia Tahun 2006 Sampai Dengan 2010

Wilayah	Tahun (persen)					Rata-Rata
	2006	2007	2008	2009	2010	
1. Jawa	64,77	63,66	62,43	61,61	61,55	62,80
2. Sumatera	19,35	19,80	20,26	20,57	20,78	20,15
3. Bali & Nusa Tenggara	2,15	2,50	2,75	2,89	2,98	2,65
4. Kalimantan	7,94	7,93	8,00	7,96	7,91	7,95
5. Sulawesi	3,80	3,98	4,36	4,67	4,82	4,33
6. Maluku & Papua	1,98	2,13	2,20	2,30	1,96	2,11
7. Indonesia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2011d (diolah).

Pertumbuhan ekonomi nasional selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 yang ditampilkan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi terutama yang didorong oleh investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2007 dan 2008. PMTB tumbuh sebesar 9,2 persen tahun 2007 dan menjadi 11,7 persen pada tahun 2008. Pertumbuhan PMTB mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 3,3 persen, yang ditengarai sebagai dampak krisis global, namun seiring dengan berlangsungnya pemulihan kondisi perekonomian, PMTB juga menunjukkan peningkatan yaitu menjadi 8,5 persen di tahun 2010.

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dan Permintaan Agregat Tahun 2006 Sampai Dengan 2010

Permintaan Agregat	Tahun (Persen)				
	2006	2007	2008	2009	2010
Pertumbuhan ekonomi	5,5	6,3	6,1	4,5	6,1
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,2	5,0	5,3	4,9	4,6
2. Konsumsi Pemerintah	9,6	3,9	10,4	15,7	0,3
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	2,9	9,2	11,7	3,3	8,5
4. Ekspor	9,2	8,0	9,5	-9,7	14,9
5. Impor	7,6	8,9	10,0	-15,0	17,3

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2011a.

Studi yang dilakukan oleh Sitompul (2007); Rustiono (2008); Luntungan (2008); dan Sodik (2005) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah terutama didorong oleh investasi yang berpengaruh secara signifikan. Hal ini berarti bahwa investasi yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tingkat pengangguran bisa direduksi, pendapatan masyarakat meningkat dan kesejahteraan masyarakatpun meningkat. Investasi juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan (*knowledge*) dari negara maju ke negara berkembang.

Dilihat dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi nasional terutama didukung oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang mengalami pertumbuhan di atas 10 persen selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, dan sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih yang tumbuh di atas 10 persen mulai tahun 2007 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3. Sektor pertanian yang paling banyak menyerap tenaga kerja, mempunyai laju pertumbuhan sebesar 3,0 persen tahun 2006 dan turun menjadi 2,9 persen di tahun 2010. Di sisi lain, sektor pertambangan mempunyai laju pertumbuhan yang paling rendah yaitu sebesar 2,2 persen pada tahun 2006, namun menunjukkan peningkatan menjadi 3,5 persen pada tahun 2010.

Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Ekonomi Di Indonesia Tahun 2006 Sampai Dengan 2010

Sektor Ekonomi	Tahun (Persen)				
	2006	2007	2008	2009	2010
1. Pertanian	3,0	3,5	4,8	4,1	2,9
2. Pertambangan dan penggalian	2,2	2,0	0,5	4,4	3,5
3. Industri Pengolahan	4,6	4,7	3,7	2,1	4,5
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	5,9	10,4	10,9	13,8	5,3
5. Konstruksi	9,0	8,6	7,3	7,1	7,0
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	6,1	8,5	7,2	1,1	8,7
7. Pangangkutan dan Komunikasi	13,6	14,4	16,7	15,5	13,5
8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	5,7	8,0	8,2	5,0	5,7
9. Jasa-jasa	6,2	6,6	6,4	6,4	6,0
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	5,5	6,3	6,1	4,5	6,1

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2011a

Laju pertumbuhan ekonomi regional selama tahun 2006 sampai tahun 2010 menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Pada tahun 2006, dari 33 provinsi di Indonesia, sebanyak 17 provinsi mempunyai laju pertumbuhan ekonomi di atas laju pertumbuhan nasional yang sebesar 5,50 persen. Pada tahun 2010, laju pertumbuhan ekonomi secara nasional meningkat menjadi 6,10 persen, dan sebanyak 17 provinsi memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari nasional, namun provinsinya berbeda dengan kondisi tahun 2006. Hal ini berarti bahwa terdapat provinsi yang mampu meningkatkan perekonomiannya, di sisi lain ada juga provinsi yang mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka kesempatan kerja yang tercipta juga akan bertambah, karena peningkatan produksi memerlukan penambahan *input* yaitu antara lain *input* tenaga kerja.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga tergantung dari besar kecilnya *output* nasional yang dapat dihasilkan dalam suatu negara, oleh sebab itu *output* nasional merupakan salah satu indikator terciptanya alokasi sumber daya yang efisien. Menurut Raharja dan Manurung (2008: 11-12), besarnya *output* nasional yang dihasilkan suatu perekonomian pada suatu periode tertentu memberikan gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya (antara lain tenaga kerja dan barang modal) digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, juga memberikan gambaran tentang produktivitas dan tingkat ke kemakmuran suatu negara. Alat ukur tingkat kemakmuran adalah *output* nasional per kapita, sedangkan alat ukur produktivitas rata-rata adalah *output* per tenaga kerja. Selain itu *output* nasional memberikan gambaran tentang masalah struktural yang dihadapi suatu perekonomian. Jika sebagian besar *output* nasional dinikmati oleh sebagian kecil penduduk, maka perekonomian mempunyai masalah dengan distribusi pendapatannya. Jika sebagian besar *output* nasional berasal dari sektor pertanian, maka perekonomian tersebut berhadapan dengan masalah ketimpangan struktur produksi. Artinya perekonomian harus memperkuat industrinya agar ada keseimbangan kontribusi

antara sektor pertanian yang dianggap sektor ekonomi tradisional dengan sektor industri yang dianggap sebagai sektor ekonomi modern.

Menurut Lewis dalam Todaro (2006:132), pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja dimulai dari investasi di sektor industri, dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern akan menimbulkan perluasan *output* pada sektor modern tersebut. Pengalihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor modern (industri) selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan *output* dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern. Menurut Kuncoro (2010:137), pertumbuhan ekonomi juga tergantung dari besaran nilai investasi yang mampu menggerakkan perekonomian.

Perkembangan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 yang ditampilkan pada Tabel 4 menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, walaupun di beberapa daerah terjadi musibah bencana alam dan perubahan ekonomi global, yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan lapangan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu rasio antara Angkatan kerja dibandingkan dengan seluruh penduduk usia kerja (umur 15 tahun ke atas) meningkat dari 66,16 persen pada tahun 2006 menjadi 67,72 persen pada tahun 2010. Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari 10,28 persen tahun 2006 menjadi 7,14 persen pada tahun 2010. Menurunnya jumlah pengangguran mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi telah dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Tabel 4. Keadaan Ketenagakerjaan Di Indonesia Tahun 2006 Sampai Dengan 2010

No	Jenis Kegiatan	Tahun (Jiwa)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Penduduk Berumur >15 Tahun	160.811.498	164.118.323	166.641.050	169.328.208	172.070.339
2	Angkatan Kerja	106.388.935	109.941.359	111.947.265	113.833.280	116.527.546
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,16	66,99	67,18	67,23	67,72
	Bekerja	95.456.935	99.930.217	102.552.750	104.870.663	108.207.767
	Pengangguran Terbuka	10.932.000	10.011.142	9.394.515	8.962.617	8.319.779
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,28	9,11	8,39	7,87	7,14
3	Bukan Angkatan Kerja	54.422.563	54.176.964	54.693.785	55.494.928	55.542.793
	Sekolah	13.530.160	13.777.378	13.226.066	13.810.846	14.011.778
	Mengurus Rumah Tangga	31.977.973	31.989.042	32.770.941	33.346.950	32.971.456
	Lainnya	8.914.430	8.410.544	8.696.778	8.337.132	8.559.559

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2010a

Perkembangan penyerapan tenaga kerja provinsi tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan Jawa Timur merupakan provinsi yang mampu menyerap tenaga kerja paling banyak, kemudian diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di ketiga provinsi ini, jumlah tenaga kerja yang dapat diserap pada tahun 2006 antara 14 juta sampai 17 juta jiwa, dan menjadi 15 hingga 18 juta jiwa pada tahun 2010. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi di wilayah ini telah mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Provinsi dengan jumlah penyerapan tenaga kerja paling sedikit adalah Papua Barat dan Maluku Utara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi di wilayah ini belum dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, selain itu sebagai provinsi yang masih "muda" (provinsi hasil pemekaran) kemampuan untuk melakukan pembangunan ekonomi masih belum optimal.

Berdasarkan keadaan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja yang telah dipaparkan, selanjutnya akan disampaikan fakta tentang kondisi kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan akhir dari seluruh proses pembangunan, dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Fakta menunjukkan bahwa nilai IPM Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai IPM negara-negara ASEAN lainnya yaitu sebesar 72,8 atau berada pada kategori *Medium Human Development*. Capaian prestasi pembangunan manusia Indonesia tertinggal jauh dibanding negara-negara tetangga, yaitu di bawah Singapura, Brunei, dan Malaysia yang sudah masuk pada kategori *High Human Development*. Kondisi ini secara langsung juga menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia masih relatif rendah.

Perkembangan IPM menurut provinsi di Indonesia selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan DKI Jakarta merupakan provinsi yang secara berkelanjutan memiliki IPM tertinggi, kemudian diikuti oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara, dengan nilai IPM di atas 75,00. Di sisi lain, provinsi yang memiliki IPM relatif rendah selama lima tahun berturut-turut adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua dengan nilai indeks antara 62,75 sampai 67,26.

Desentralisasi pembangunan sebagai akibat kebijakan otonomi daerah membawa konsekuensi pada ketidakseragaman pelaksanaan dan hasil pembangunan di masing-masing provinsi. Setiap provinsi akan mempunyai strategi tersendiri dalam membangun daerahnya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Kebijakan pembangunan di setiap provinsi akan berbeda, khususnya kebijakan dibidang pembangunan ekonomi (investasi dan pertumbuhan ekonomi), dan ketenagakerjaan (penyerapan tenaga kerja), namun tujuan akhirnya adalah sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fakta yang ditemui adalah IPM secara nasional maupun provinsi masih rendah, yaitu masih pada kategori *Medium Human development*. Relatif rendahnya capaian IPM tersebut berarti telah terjadi masalah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Kondisi ini selanjutnya menimbulkan minat dan ketertarikan

untuk melakukan studi mengenai “Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Di Indonesia “.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan judul penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia?
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia?
5. Apakah penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Todaro (2000:137-138), investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan semakin memperluas kesempatan kerja. Selanjutnya, Mankiw (2003:61) menyatakan bahwa inovasi teknologi merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan permintaan investasi. Menurut Sukirno (2008:122), investasi dapat juga diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Pengejaran pertumbuhan merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia dewasa ini. Keberhasilan program-program pembangunan sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan *output* dan pendapatan nasional, bahkan baik buruknya kualitas kebijakan pemerintah dan mutu aparatnya di bidang ekonomi secara keseluruhan biasanya diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan *output* nasional yang dihasilkan (Jhingan,2003:47). Menurut Todaro (2000:136) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara yaitu : 1) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia; 2) Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah tenaga kerja; dan 3) Kemajuan teknologi, yang dianggap sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting dan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: (a) kemajuan

teknologi yang bersifat netral; (b) kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja; (c) kemajuan teknologi yang hemat modal.

Sejalan dengan Todaro, Simon Kuznets dalam Arsyad (2010:277) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, kenaikan pada kemampuan ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan, serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang biasanya diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita, tujuan pembangunan ekonomi di samping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Menurut Todaro (2000: 20), pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil, perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan *output* riil, sedangkan pembangunan ekonomi menunjukkan struktur *output* dan alokasi *input* pada berbagai sektor perekonomian.

Keynes dalam Jhingan (2003: 133-138) menekankan pentingnya permintaan agregat atau permintaan efektif sebagai faktor utama penggerak perekonomian, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Keynes memandang pemerintah sebagai agen independen yang mampu menstimulasi perekonomian melalui kerja publik. Kebijakan pemerintah yang ekspansioner dapat menaikkan "permintaan efektif" jika sumber daya dipakai tanpa merugikan konsumsi atau investasi. Pada masa resesi, kenaikan pada pengeluaran Pemerintah (G) akan mendorong kenaikan konsumsi (C) dan investasi (I), dan karenanya dapat menaikkan GDP (Y).

Harrod-Domar dalam Arsyad (2010:82-85) mengembangkan teori Keynes dengan memberi peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai sifat ganda yang dimiliki investasi. *Pertama*, investasi menciptakan pendapatan (merupakan dampak dari permintaan investasi), dan *kedua*, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok kapital (merupakan dampak dari penawaran investasi). Solow dan Swan dalam Arsyad (2010:88-89) kemudian mengoreksi teori Harrod-Domar dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Asumsi yang digunakan adalah skala pengembalian yang konstan (*constan return to scale*), substitusi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) bersifat sempurna, dan adanya produktivitas marjinal yang semakin menurun (*diminishing marginal productivity*) dari tiap *inputnya*.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih

besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya adalah besar. Menurut Pressman (2002:28-30), pertumbuhan ekonomi bisa berjalan karena adanya proses mekanisasi dan pembagian kerja, selanjutnya pembagian kerja akan membuat produktivitas pekerja meningkat. Menurut Todaro (2000:324), model ekonomi ketenagakerjaan yang berkaitan dengan investasi, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja adalah Model Makro *Output-Kesempatan kerja (output-employment macro model)* yang berfokus pada hubungan antara akumulasi modal, pertumbuhan *output* industri, dan penciptaan lapangan kerja. Perhatian utama dari model pertumbuhan ini adalah pada kebijakan untuk meningkatkan *output* nasional melalui akumulasi modal. Model ini menghubungkan tingkat penyediaan kesempatan kerja dengan tingkat pertumbuhan GNP, sehingga model ini mengisyaratkan bahwa dengan memaksimalkan pertumbuhan GNP-nya, suatu negara dapat memaksimalkan penyerapan tenaga kerja.

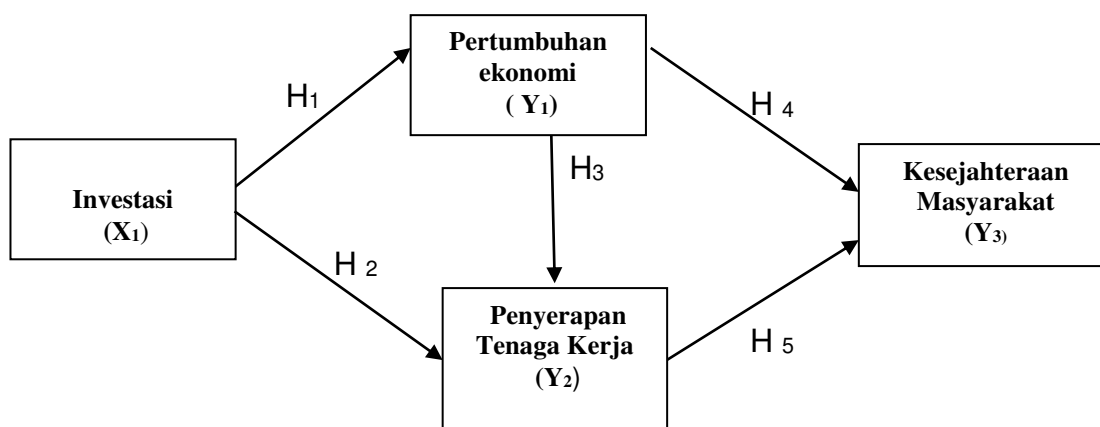
Rosenstein-Rodan melalui teori Dorongan kuat (*big push theory*) (Todaro,2000:325; Jhingan,2003:177; Irawan & Suparmoko, 2002:151) menyatakan bahwa arah industrialisasi yang cepat sangat diperlukan bagi berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan dan tercapainya keberhasilan pembangunan nasional. Menurut Lewis dalam Jhingan (2003:156-158), perekonomian yang terbelakang terdiri dari dua sektor yaitu sektor tradisional di pedesaan dan sektor industri modern perkotaan yang lebih produktif dan dapat menampung kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian. Perhatian utama model ini adalah pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja dari desa ke kota serta pertumbuhan produksi dan kesempatan kerja di sektor modern.

Semua negara di dunia telah sepakat bahwa untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu bangsa, indikator yang digunakan adalah nilai produk nasional bruto per kapita. Semakin tinggi produk nasional bruto per kapita, semakin makmur negara yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi adanya peningkatan kesejahteraan suatu bangsa (Irawan & Suparmoko, 2002 : 439). Amartya Sen dalam Todaro (2006: 23) memberikan suatu gambaran dan proses rasional ke arah melepaskan masyarakat dari hambatan untuk memperoleh kemajuan (*unfreedom*). Pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir. Pembangunan haruslah lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan yang dijalani dan kebebasan yang dinikmati. Todaro (2006:250) menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentasnya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat.

Menurut Otto van Bismarck dalam Husodo (2009:65), negara harus bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup minimum setiap warganegaranya, sementara Spicker dalam Suharto (2008:5) menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan

masyarakat adalah dengan pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warga.

Berdasarkan rerangka teoritis tersebut, maka model konseptual dalam penelitian ini adalah :



Gambar 1. Model Konseptual

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksplanatori, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan instansi lain yang terkait, berupa data *times series* dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, dan data *cross-section* yang terdiri atas 33 provinsi, sehingga merupakan data panel atau *pooled data*.. Lokasi penelitian meliputi seluruh provinsi yang ada di Indonesia yaitu sebanyak 33 provinsi.

Variabel di dalam penelitian ini terdiri dari variabel eksogen dan variabel endogen. Adapun klasifikasi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel investasi (X_1) diklasifikasikan sebagai variabel eksogen, dan berperan sebagai variabel independen yaitu variabel yang keragamannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain di dalam model.
2. Variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) dan penyerapan tenaga kerja (Y_2), diklasifikasikan sebagai variabel endogen, dan berperan sebagai variabel antara (*intervening variable*) yaitu variabel yang dipengaruhi dan mempengaruhi variabel lain.

3. Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y_3), diklasifikasikan sebagai variabel endogen dan berperan sebagai variabel dependen.

Pengolahan data dalam studi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi data, untuk mendapatkan data yang akurat.
2. Membuat tabulasi secara baik dan benar sesuai dengan kebutuhan analisis.
3. Melakukan pengolahan data menggunakan *Statistical Package for Social Science (SPSS) for windows* versi 17.0 dengan alat analisis jalur (*path analysis*).
4. Melakukan analisis olahan data untuk membuktikan hipotesis penelitian.

Analisis data diawali dengan analisis deskriptif, yaitu statistik yang dipergunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2008:29). Teknik analisis jalur (*path analysis*) digunakan untuk menguji besarnya sumbangan (kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X_1 terhadap Y_1 dan Y_2 serta dampaknya kepada Y_3 (Riduwan & Engkos, 2008:2).

Pengujian model dan perhitungan terhadap koefisien jalur terlebih dahulu dilakukan dengan merumuskan hipotesis, yaitu

- Hipotesis 1 : Investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia.
- Hipotesis 2 : Investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia.
- Hipotesis 3 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia.
- Hipotesis 4 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia.
- Hipotesis 5 : Penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia.

Model persamaan struktural yang dibuat dengan mengacu pada diagram jalur pada Gambar 1 adalah :

$$\text{Model 1 : } Y_1 = \rho_{y1x1} X_1 + \rho_{y1} \varepsilon_1 \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{Model 2 : } Y_2 = \rho_{y2x1} X_1 + \rho_{y2y1} Y_1 + \rho_{y2} \varepsilon_2 \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Model 3 : } Y_3 = \rho_{y3y1} Y_1 + \rho_{y3y2} Y_2 + \rho_{y3} \varepsilon_3 \dots\dots\dots (3)$$

Di mana:

X_1 adalah investasi

Y_1 adalah pertumbuhan ekonomi

Y_2 adalah penyerapan tenaga kerja

Y_3 adalah kesejahteraan masyarakat

ε_{1i} adalah error term (residu) model

ρ_{y1x1} adalah koefisien jalur X_1 dengan Y_1

ρ_{y2x1} adalah koefisien jalur X_1 dengan Y_2

ρ_{y2y1} adalah koefisien jalur Y_1 dengan Y_2

ρ_{y3y1} adalah koefisien jalur Y_1 dengan Y_3

ρ_{y3y2} adalah koefisien jalur Y_2 dengan Y_3

4. DISKUSI

Hasil pengujian hipotesis melalui analisis jalur menemukan bahwa variabel Investasi (X_1) berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y_1), namun variabel Investasi berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Disisi lain, variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y_1) dan Penyerapan Tenaga kerja (Y_2) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat.

Koefisien jalur yang merupakan hipotesis dalam penelitian ini disajikan dalam tiga persamaan sebagai berikut:

$$\text{Model 1 : } Y_1 = -0,02 X_1$$

$$\text{Model 2 : } Y_2 = 0,57 X_1 + 0,00 Y_1$$

$$\text{Model 3 : } Y_3 = 0,04 Y_1 + 0,08 Y_2$$

Hasil pengujian hipotesis menemukan koefisien jalur dari masing-masing hubungan antar variabel secara rinci yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Pengujian Koefisien Jalur

Variabel	Koefisien	t	Sig	Hasil Pengujian
Investasi (X_1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y_1)	-0,02	-0,25	0,805	Tidak signifikan
Investasi (X_1) terhadap Penyerapan Tenaga kerja (Y_2)	0,57	9,80	0,000	Signifikan
Pertumbuhan Ekonomi (Y_1) terhadap Penyerapan Tenaga kerja (Y_2)	0,00	0,01	0,993	Tidak signifikan
Pertumbuhan Ekonomi (Y_1) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y_3)	0,04	0,49	0,624	Tidak Signifikan
Penyerapan Tenaga kerja (Y_2) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y_3)	0,08	0,97	0,332	Tidak Signifikan

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis jalur antara investasi terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia, diperoleh nilai koefisien jalur - 0,02 dengan nilai t sebesar - 0,25 dan diperoleh nilai probabilitas signifikansi (Sig) sebesar 0,805, lebih besar dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Berdasarkan hasil pengujian ini berarti investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Koefisien jalur yang bertanda negatif bermakna bahwa pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi bergerak tidak searah, artinya kenaikan investasi diikuti dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi, atau sebaliknya. Faktor penyebab investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah :

1. Dampak dari krisis ekonomi global dan musibah bencana alam di beberapa daerah di Indonesia (khususnya di provinsi NAD dan Papua) yang terjadi selama periode studi mengakibatkan terganggunya perekonomian nasional maupun provinsi, dan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - i. Dampak krisis ekonomi global terhadap perekonomian nasional dapat dilihat dari menurunnya pertumbuhan ekonomi regional dan nasional pada tahun 2009. Sebagian besar provinsi di Indonesia (26 provinsi) mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, kecuali di provinsi Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Di sisi lain, perkembangan investasi di seluruh provinsi di Indonesia memang menunjukkan adanya kenaikan, namun kemampuan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat lemah. Akibatnya investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan arah yang negatif.
 - ii. Gempa Tsunami dan gempa tektonik, terutama yang melanda Aceh dan Papua, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di dua kawasan tersebut mengalami penurunan yang cukup tajam bahkan negatif. Di provinsi NAD, pertumbuhan ekonomi yang negatif berturut-turut terjadi selama tahun 2007

sampai dengan tahun 2009. Pemulihan ekonomi di wilayah ini dapat dilihat dari tingginya pengeluaran konsumsi pemerintah selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 yang mencapai rata-rata 25 persen dari PDRB provinsi NAD, bahkan pada tahun 2009 laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 24,88 persen, tertinggi di dibandingkan provinsi lainnya pada tahun yang sama. Di provinsi Papua, pertumbuhan ekonomi yang negatif terjadi pada tahun 2006, 2008, dan 2010. Pemulihan ekonomi dapat dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah selama 5 (lima) tahun (tahun 2006 sampai dengan 2010), yaitu sebesar 20,81 persen (BPS, 2011d :117), tertinggi di seluruh provinsi di Indonesia

2. Penyebaran investasi tidak merata di seluruh provinsi. Sekitar 62 persen realisasi investasi PMTB di Indonesia berlokasi di pulau Jawa, khususnya di provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur serta Jawa Barat, dan sekitar 20 persen berlokasi di Sumatera. Provinsi DKI Jakarta menjadi tempat tujuan investasi yang tertinggi selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, yaitu sebesar 27,79 persen (tahun 2006), turun menjadi 27,20 persen (tahun 2010), selanjutnya diikuti oleh provinsi Jawa Timur dengan total investasi sekitar 13,29 persen (tahun 2006), turun menjadi 11,91 persen pada tahun 2010, dan Jawa Barat dengan total investasi sebesar 11,54 persen (tahun 2006), menjadi 11,49 persen (tahun 2010). Ketersediaan fasilitas, infrastruktur dan pasokan energi yang memadai, merupakan alasan tingginya investasi di wilayah pulau Jawa. Keadaan ini menyebabkan penyebaran hasil-hasil pembangunan menjadi tidak merata dan selanjutnya akan berdampak pada tidak meratanya pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia.
3. Rata-rata penggunaan PDRB untuk investasi adalah lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran untuk konsumsi. Secara nasional rata-rata penggunaan PDB untuk investasi PMTB hanya sebesar 22,0 persen, sementara penggunaan untuk konsumsi rumah tangga mencapai 55,46 persen. Hal yang sama juga terjadi pada lingkup provinsi, di mana rata-rata penggunaan PDRB di hampir semua provinsi adalah untuk pengeluaran konsumsi swasta, kecuali provinsi Kalimantan Timur. Di provinsi ini, pengeluaran investasinya sebesar 16,42 persen, lebih besar daripada pengeluaran konsumsi swasta (15,80 persen). Pengeluaran investasi yang paling rendah terjadi di provinsi Maluku (4,01 persen), dan yang tertinggi di Kalimantan Tengah (38,40 persen). Kondisi tersebut mempunyai arti bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia ternyata tidak ditopang oleh investasi, melainkan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga.
4. Rata-rata pertumbuhan investasi tidak sebanding dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi belum mampu untuk menggerakkan perekonomian yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi daripada pertumbuhan investasi. Pada lingkup nasional, rata-

rata laju pertumbuhan investasi adalah sebesar 6,97 persen sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,49 persen.

Hasil pengujian hipotesis antara investasi terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia (Tabel 5), diperoleh nilai koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,57 dan diperoleh nilai probabilitas signifikansi (Sig) sebesar 0,000, lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Berdasarkan hasil pengujian ini berarti hipotesis kedua yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia dapat diterima, karena secara statistik terbukti. Koefisien jalur yang bertanda positif bermakna bahwa pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja berjalan searah, yaitu semakin tinggi tingkat investasi, maka semakin banyak tenaga kerja yang dapat diserap. Sebaliknya, penurunan dalam investasi akan mengurangi penyerapan tenaga kerja.

Faktor yang menyebabkan investasi berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu dengan adanya investasi maka dibutuhkan tenaga kerja untuk merealisasikan investasi tersebut, misalnya investasi di perkebunan sawit akan langsung membutuhkan tenaga kerja untuk mengolah tanah, menanam, memelihara, serta tenaga untuk manajemennya.

Membandingkan rata-rata pertumbuhan investasi dengan rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, secara nasional rata-rata pertumbuhan investasi adalah sebesar 6,97 persen sedangkan rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 2,63 persen. Keadaan ini bermakna bahwa investasi yang dilakukan telah mampu meningkatkan kapasitas produksi, yang selanjutnya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, walaupun dalam persentase yang relatif rendah. Pada tataran provinsi, dua provinsi yang mempunyai rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tertinggi, yaitu Kepulauan Riau (10,22 persen), dan Maluku (7,50 persen), tetapi rata-rata pertumbuhan investasi di kedua provinsi ini lebih tinggi dari pada rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerjanya. Keadaan ini bermakna bahwa : 1) investasi di wilayah tersebut belum mampu meningkatkan pertumbuhan penyerapan tenaga kerjanya; 2) investasi yang dilakukan cenderung pada investasi yang padat modal. Provinsi berikutnya yang mempunyai rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tinggi adalah provinsi Banten yaitu sebesar 7,40 persen, tetapi mempunyai rata-rata pertumbuhan investasi yang paling rendah (0,14 persen). Keadaan ini disebabkan oleh investasi di provinsi Banten umumnya merupakan investasi yang sudah lama berlangsung (merupakan investasi warisan dari provinsi induk), sehingga sudah mempunyai kemampuan yang besar untuk menggerakkan peronomian dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, tiga provinsi dengan rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang rendah adalah di provinsi Riau (0,13 persen), Jawa Tengah (0,36 persen), dan Yogyakarta (0,84 persen), sedangkan rata-rata pertumbuhan investasi di ketiga provinsi ini berturut-turut sebesar 7,61 persen (Riau), 7,7 persen (Jawa Tengah), dan 4,47 persen (Yogyakarta). Kondisi ini menunjukkan

bahwa kemampuan investasi untuk dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja masih sangat rendah, yang disebabkan oleh :1) investasi yang dilakukan cenderung merupakan investasi yang padat modal; dan 2) investasi yang dilakukan adalah untuk mengganti barang modal yang telah rusak dan bukan untuk investasi baru.

Pengujian hipotesis ketiga antara pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia diperoleh nilai koefisien jalur yang bertanda positif yaitu sebesar 0,00 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,993 yang lebih besar dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Berdasarkan hasil pengujian ini, berarti hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia, ditolak, karena secara statistik tidak terbukti. Koefisien jalur yang bertanda positif dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,00 bermakna bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, artinya kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja secara signifikan. Hasil pengujian hipotesis ke tiga ini, mendukung hasil pengujian pada hipotesis pertama dimana investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pada tahap selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh :

1. Pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas sehingga tidak membawa dampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Pada tataran nasional, rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi diindikasikan oleh tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif rendah dan lambat kenaikannya. Sepanjang tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49 persen, dan rata-rata pertumbuhan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 2,63 persen, suatu angka yang relatif kecil untuk dapat menyerap tenaga kerja yang setiap tahun terus meningkat. Pada tataran provinsi terlihat adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi maupun tingkat penyerapan tenaga kerja. Terdapat sekitar 22 provinsi yang mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata nasional, sisanya sebanyak 11 provinsi dibawah rata-rata nasional. Provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi ditempati oleh provinsi Gorontalo sebesar 10,98 persen, diikuti oleh provinsi Papua Barat sebesar 10,64 persen, dan provinsi Sulawesi Barat sebesar 8,77 persen. Bila dikaitkan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja diantara ke tiga provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi tersebut, provinsi Sulawesi Barat mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja yang paling tinggi yaitu sekitar 6,55 persen, sehingga dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat lebih berkualitas dibandingkan dua provinsi lainnya.
2. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi bukan didukung oleh investasi melainkan di dominasi oleh pengeluaran konsumsi sektor rumah tangga. Secara nasional, rata-rata

penggunaan PDB yang paling besar adalah untuk pengeluaran konsumsi swasta, yaitu sebesar 55,46 persen, sementara penggunaan untuk penanaman modal (investasi) hanya sebesar 22,00 persen saja. Pengeluaran konsumsi swasta tidak dapat menciptakan lapangan kerja secara langsung, sebaliknya investasi dapat menciptakan lapangan kerja secara langsung. Pada lingkup provinsi, rata-rata penggunaan PDRB untuk pengeluaran konsumsi swasta juga lebih besar daripada pengeluaran untuk investasi.

3. Sebagian besar penyerapan tenaga kerja adalah pada sektor primer dengan produktivitas yang rendah. Secara nasional, sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor primer (40,81 persen) sementara sumbangan sektor ini terhadap PDB hanya sebesar 22,18 persen, lebih rendah daripada sumbangan sektor tersier yang mencapai 44,01 persen. Hal yang sama ditemui pada lingkup provinsi, di mana sebagian besar tenaga kerjanya terserap di sektor primer.

Hasil pengujian terhadap hipotesis keempat antara pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia, memperoleh hasil yang tidak signifikan. Diperoleh nilai koefisien jalur 0,04 dengan nilai t sebesar 0,49 dan diperoleh probabilitas signifikansi (Sig) sebesar 0,624 yang lebih besar dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Koefisien jalur yang bertanda positif bermakna bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat berjalan searah, yaitu semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka akan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor penyebab pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah :

1. Kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan perbaikan dalam pendapatan perkapita. Provinsi dengan rasio pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari angka nasional ternyata tidak selalu mempunyai rasio pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari angka nasional juga. Sebanyak 22 (dua puluh dua) provinsi mempunyai laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, namun hanya terdapat 5 (lima) provinsi yang rata-rata pendapatan per kapitanya di atas rata-rata nasional. Tiga provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah provinsi Gorontalo, Papua Barat, dan Sulawesi Barat, sementara tiga provinsi yang mempunyai pendapatan per kapita tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta, diikuti oleh Kalimantan Timur dan Riau. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh perbaikan dalam komponen IPM, dan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - i. Standard hidup layak yang dihitung melalui pengeluaran per kapita riil disesuaikan (*purchasing power parity*) menunjukkan sebanyak 20 provinsi pada tahun 2006 memiliki *purchasing power parity* yang lebih rendah dari angka

nasional, dan turun menjadi 17 provinsi pada tahun 2010, padahal sebanyak 22 (dua puluh dua) provinsi mempunyai laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Kondisi ini memperkuat hipotesis bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

- ii. Pendidikan, yang dinilai dari Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan Angka Melek Huruf secara nasional masih belum menyentuh ke nilai 100 persen, artinya Indonesia masih belum bebas dari buta huruf, namun demikian angka melek huruf ini menunjukkan kenaikan yang terus menerus yaitu dari 91,50 persen pada tahun 2006 hingga menjadi 92,91 persen pada tahun 2010. Pada lingkup provinsi, Sulawesi Utara secara terus menerus mempunyai angka melek huruf yang paling tinggi yaitu di atas 99 persen, sementara provinsi Papua menjadi provinsi yang memiliki angka melek huruf terendah selama lima tahun berturut-turut yaitu sekitar 75,50 tahun. Terdapat sekitar 12 provinsi (36,36 persen) pada tahun 2006 yang memiliki angka melek huruf dibawah rata-rata nasional, dan pada tahun 2010 hanya berkurang menjadi 11 provinsi (33,33 persen). Rata-rata lama sekolah secara nasional adalah sekitar 7 tahun, artinya bahwa rata-rata pendidikan masyarakat di Indonesia adalah setara dengan Tamatan SD namun belum Tamat SLP. Pada lingkup provinsi, DKI Jakarta selama lima tahun berturut-turut memiliki rata-rata lama sekolah yang paling tinggi yaitu di atas 10 tahun atau setara dengan SLA, sementara provinsi dengan rata-rata lama sekolah yang paling rendah adalah Papua yaitu sekitar 6 tahun atau setara dengan tamat SD. Terdapat kesenjangan yang cukup tajam antara Rata-rata lama sekolah yang tertinggi dengan yang terendah. Dari 33 provinsi, sekitar 11 provinsi (33,33 persen) pada tahun 2006 mempunyai rata-rata lama sekolah di bawah rata-rata nasional, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 14 provinsi (42,42 persen). Kondisi ini memperkuat hipotesis bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
- iii. Angka Harapan Hidup (AHH) secara nasional berkisar antara 68 tahun hingga 69 tahun, masih sangat jauh dibandingkan standard maksimum yang ditetapkan UNDP yaitu 85 tahun. Pada lingkup provinsi, Yogyakarta memiliki AHH yang paling tinggi selama lima tahun berturut-turut yaitu sekitar 73 tahun, sementara provinsi dengan AHH paling rendah adalah provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sekitar 60 hingga 62 tahun. Terdapat 16 provinsi (48,48 persen) pada tahun 2006 yang mempunyai AHH di bawah rata-rata nasional, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 17 provinsi (51,51 persen).

Terdapat perbedaan dalam pencapaian indikator komponen IPM antar provinsi, yang selanjutnya akan menyebabkan adanya perbedaan dalam pencapaian IPM. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus meningkat baik secara nasional maupun provinsi, IPM juga mengalami peningkatan baik secara nasional maupun provinsi, namun masih terdapat provinsi yang pencapaian IPMnya di bawah rata-rata

nasional. Keadaan ini memperkuat hipotesis bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengujian terhadap hipotesis ke lima antara penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia diperoleh nilai koefisien jalur adalah 0,08 dengan nilai probabilitas signifikansi (Sig) sebesar 0,332 yang lebih besar dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Berdasarkan hasil pengujian ini berarti penyerapan tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia.

Penyerapan tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh :

1. Upah yang diterima tenaga kerja adalah lebih rendah dari kebutuhan hidup yang layak (KHL). Secara nasional, upah minimum pada tahun 2006 hanya dapat memenuhi 85 persen KHL walaupun pada tahun 2010 rata-rata upah minimum di Indonesia telah sama dengan KHL. Upah minimum tahun 2006 yang ditetapkan oleh semua provinsi di Indonesia ternyata belum memenuhi KHL. Tahun 2007 terdapat empat provinsi yang memberikan upah minimum yang nilainya sama dengan KHL dan empat provinsi yang memberikan upah minimum lebih besar dari KHL. Empat provinsi yang memberikan upah minimum yang sama nilainya dengan KHL terdiri dari provinsi Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat, sedangkan empat provinsi yang memberikan upah diatas KHL yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Papua Barat, dan Papua. Perbandingan upah minimum dan KHL pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 tidak menjadi lebih baik dibandingkan kondisi tahun 2007 karena hanya terdapat 5 (lima) provinsi yang memberikan upah minimum dengan nilai yang sama atau lebih besar dari KHL, sementara tahun 2009 hanya tiga provinsi yang memberikan upah minimum lebih besar dari KHL.
2. Upah yang diterima tenaga kerja berada dibawah batas Pendapatan Tak Kena Pajak atau PTKP. Hal ini mengindikasikan bahwa upah yang diterima pekerja belum dapat meningkatkan kesejahteraan.

Kondisi tersebut diatas memperkuat hipotesis bahwa penyerapan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika tenaga kerja memperoleh upah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan yang bersifat ekonomi maupun kebutuhan yang bersifat non ekonomi dan bukan hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan layak.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan tentang pengaruh investasi dan upah terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- i. Investasi berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan investasi menyebabkan penurunan pada pertumbuhan ekonomi di provinsi di Indonesia.
- ii. Investasi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia. Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis dua yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia. Kenaikan investasi akan diikuti dengan kenaikan pada penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia.
- iii. Berdasarkan pengujian hipotesis, diperoleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia. Bermakna bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia.
- iv. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Tanda positif bermakna bahwa kenaikan pada laju pertumbuhan ekonomi akan disertai dengan kenaikan kesejahteraan masyarakat di provinsi di Indonesia.
- v. Penyerapan tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat berjalan searah, artinya apabila penyerapan tenaga kerja meningkat, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- vi. Temuan tentang pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat, memberikan dukungan analisis bagi kepentingan pengembangan kebijakan dan perencanaan pemerintah. Secara khusus, berguna sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan strategi di bidang ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Survey angkatan kerja nasional (SAKERNAS) tahun 2006 s.d 2010*. Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2011a). *Berita resmi statistik tahun 2011*. Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2011d). *Produk domestik regional bruto provinsi-provinsi di Indonesia menurut penggunaan tahun 2006-2010*. Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia.
- Husodo, S. Y. (2009). *Menuju welfare state*. Jakarta: Baris Baru
- Irawan., & Suparmoko, M. (2002). *Ekonomika pembangunan*. Yogyakarta: BPFE
- Jhingan, M. L. (2003). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika pembangunan. Teori, masalah, dan kebijakan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Luntungan, A. Y. (2008). Analisis investasi dan pertumbuhan ekonomi di kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 48-62.
- Mankiw, N. G. (2003). *Teori makro ekonomi* . Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2006). *Pengantar ekonomi makro*, Jakarta: Salemba Empat
- Pressman, S. (2002). *Lima puluh pemikir ekonomi dunia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Raharja, P., & Mandala, M. (2008). *Teori ekonomi makro. Suatu pengantar*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Riduwan., & Engkos, A. K. (2008). *Cara menggunakan dan memakai analisis jalur (Path Analysis)*. Bandung: Alfabeta.
- Rustiono, D. (2008). *Analisis pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah*. Tesis. Magister Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Universitas Diponegoro, Semarang.

- Sitompul, N. L. (2007). Analisis pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap PDRB Sumatera Utara. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sodik, J., & Nuryadin, D. (2005). Investasi dan pertumbuhan ekonomi regional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 157-170.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. (2008). *Islam negara kesejahteraan*. Diperoleh dari Artikel. www.policy.hu/suharto. Di akses 12 Januari 2010. Jam 01.24
- Sukirno, S. (2008). *Mikro ekonomi. Teori pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Todaro, P. M. (2000). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Todaro, P. M., & Stephen. C. S. (2006). *Pembangunan ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga